



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4877);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

(1) IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021;

Pasal 3

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya diberikan tugas untuk :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 16 Februari 2019
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

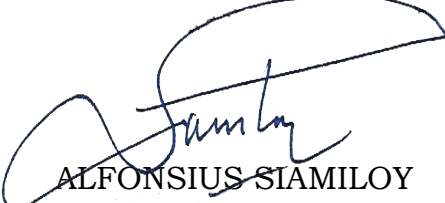


BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal, 16 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019
NOMOR 4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2019
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Jumlah Guru Yang Tersertifikasi	1.	Meningkatnya Jumlah Guru Yang Tersertifikasi	1.	Pelaksanaan PLPG/PPG Bagi Guru-Guru Dalam Jabatan Yang Belum Di Sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.	Peningkatan Kualitas Guru Dalam Jabatan Melalui Program Magang/Pelatihan Berjenjang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatkan Jumlah Guru Yang Berkualitas S1/D1V	2.	Meningkatnya Jumlah Guru Yang Berkualitas S1 / DIV	3.	Jumlah Guru Yang Belum Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				4.	Kepala Sekolah Yang Berkualitas S1 / DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5.	Guru Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatkan Kuantitas Layanan PAUD/TK di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya	3.	Meningkatnya Layanan Paud/TK di Seluruh Wilayah MBD	6.	Memfasilitasi Pembukaan PAUD Disemua Desa / Anak Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				7.	Meningkatnya Rasio Perbandingan Guru dan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				8.	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Meningkatkan Jumlah Anak Usia Sekolah Yang Mengikuti Program Belajar 12 Tahun	4.	Menigkatkan Jumlah Anak Usia Sekolah Yang Mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun	9.	Presentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				10.	Presentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				11.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				12.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				13.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pemerataan Jumlah Dan Kompetensi Guru Sesuai Bidang Studi	5.	Masing – Masing Sekolah Memenuhi Rasio Guru Murid Sesuai Bidang Studi	14.	Rasio Guru / Murid SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				15.	Rasio Guru / Murid SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				16.	Rasio Guru / Murid per Kelas Rata-Rata SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				17.	Rasio Guru / Murid per Kelas Rata-Rata SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				18.	Rasio Tingkat Kompetensi Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				19.	Presentase Ketersediaan Guru Mata Pelajaran SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Pengadaan Sarana / Prasarana System Informasi Pendidikan	6.	Meningkatnya Jumlah Sekolah Yang Terkoneksi Jaringan ICT Berbasis Viber Optik	19.	Program Sekolah Yang Berbasis ICT Dengan Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				20.	Rekrutmen Tenaga ICT dengan Fiber Optik (Satu Sekolah Satu Tenaga)	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Menyediakan Akses Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi di Maluku Barat Daya Meningkatkan Mutu Pendidikan Mulai Tingkat SD, SMP, SMA/SMK	7.	Tersedianya Perguruan Tinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya	21.	Tersedianya Bangunan Kampus PDD-Negeri	Dinas Pendidikan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
8.	Menyediakan Sarana / Prasarana Pendidikan Yang Memadai	8.	Meningkatnya Pemenuhan Kualitas Pendidikan	22.	Kondisi Fisik Gedung PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Perpustakaan dan Laboratorium	Dinas Pendidikan
				23.	Jumlah Laboratorium IPA yang dimiliki Kecamatan	Dinas Pendidikan
				24.	Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)	Dinas Pendidikan
				25.	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dinas Pendidikan
				26.	Rasio Ketersediaan SD Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Dinas Pendidikan
				27.	Rasio Ketersediaan SMP terhadap Penduduk Usia Sekolah	Dinas Pendidikan
9.	Peningkatan SDM Di Bidang Kesehatan	9.	Terbentuknya Politeknik Kesehatan	28.	Dokumen Kerjasama, Design Bangunan	Dinas Kesehatan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
10.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Institusi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman) Yang Mampu Memberi Rasa Aman Sekaligus Melindungi Hak Masyarakat di Seluruh Wilayah MBD	10.	Adanya Penegakan Hukum di Wilayah Maluku Barat Daya	29	Pembentukan Polres, Kodim, AL, Brimob, Kejaksaan, Kehakiman, Imigrasi, Karantina, Bea Cukai, dan Instansi lainnya di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya	Satuan Polisi Pamong Praja
				30.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Satuan Polisi Pamong Praja
				31.	Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
				32.	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Menjaga Kepentingan dan Kedaulatan NKRI serta Memperpendek Rentang Kendali Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten	11.	Memperkuat/Memperkokoh Rasa Nasionalisme Yang Tinggi Bagi Masyarakat MBD Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Demokrat Timor Leste dan Negara Australia	33.	Tersedianya Kajian Naskah Akademik Pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya Bersamaan (satu kesatuan) dengan Proses Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Terselatan dan Kabupaten Babar Damer Dalam Wilayah Kabupaten MBD	Bagian Adminstrasi Pemerintahan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				34.	Tersedianya Perda tentang Pembentukan Propinsi Perbatasan Kepulauan Maluku Barat Daya bersamaan (satu kesatuan) dengan proses perjuangan Babar Damer dalam wilayah Kabupaten MBD	Bagian Adminstrasi Pemerintahan
12.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	35.	Tersedianya Dokumen Pembangunan Tahunan	BAPPEDA
				36.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis	BAPPEDA
				37.	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	BAPPEDA
13.	Pembentukan Sistem Pengontrol ADD Dalam Rangka Menjamin Keberlanjutan Program Pembangunan Desa	13.	Tersedianya System Pengontrol ADD	38.	Rasio Jumlah Desa Yang Memenuhi Aturan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
				39.	Pemantauan, Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				40.	Penelitian Pengkajian dan Analisa Teknis Data Informasi Mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
				41.	Penyelenggaraan Pelatihan TOT, Sosialisasi, Seminar Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
14.	Meningkatkan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan	14.	Tersedianya Sumber Pendapatan Daerah Dana Bagi Hasil Pada Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	42.	Adanya Peraturan Daerah Tentang Pembagian Keuntungan Antar Pusat dan Daerah Dalam Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	Badan Keuangan dan Aset
15.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	15.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	44.	Menurunnya Jumlah KK Miskin	Dinas Sosial
				45.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PMKS	Dinas Sosial

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				46.	Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Miskin Terhadap, Pendidikan, Kesehatan, Telekomunikasi, Listrik dan Air Bersih	Dinas Sosial
				47.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat	Dinas Sosial
				48.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Dinas Sosial
		16	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	49.	Angka Kematian Ibu / 1000 Kelahiran	Dinas Kesehatan
				50.	Presentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	Dinas Kesehatan
				51.	Tingkat Kesehatan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
16.	Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintah Sebagai Pelayan Bagi Masyarakat Diseluruh Wilayah MBD	18.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	52.	Pelaksanaan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				53.	Pelaksanaan Bimtek	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				54.	Pelaksanaan Diklat Perjenjangan Struktural (PIM 2,3,4)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				55.	Pembinaan Praja IPDN secara Terintegritas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		19.	Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset
				57.	Kinerja Laporan-Laporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset
		20.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Daerah	58.	Presentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
				59.	Presentase Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Bagian Organisasi
				60.	Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Bagian Organisasi
				61.	Presentase Penerapan IKM	Bagian Organisasi

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				62.	Presentase Penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Analisa Jabatan	Bagian Organisasi
				63.	Presentase Penerapan ROAD MAP Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
				64.	Presentase LAKIP dan PK Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Organisasi
				65.	Presentase Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
		21. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah		66.	Penyusunan dan pengembangan produk perundang-undangan Daerah	Bagian Hukum
				67.	Sosialisasi, Evaluasi dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan dan Kondisi Daerah	Bagian Hukum

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
		22.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	68.	Tersedia Sistem Informasi Terpadu (e-government) Yang Dapat Memperlancar dan Meningkatkan Mutu Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				69.	Adanya Perkada Tentang Pendelegasian Kewenangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	23.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	70.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	Dinas Kesehatan
				71.	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Dinas Kesehatan
				72.	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan
				73.	Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
				74.	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Dinas Kesehatan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				75.	Cakupan Kunjungan Bayi	Dinas Kesehatan
				76.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child ImuniZation (UCI)	Dinas Kesehatan
				77.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Dinas Kesehatan
				78.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Usia 6-24 Bulan	Dinas Kesehatan
				79.	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	Dinas Kesehatan
				80.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Dinas Kesehatan
				81.	Cakupan Peserta KB Aktif	Dinas Kesehatan
				82.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	Dinas Kesehatan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				83.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk x1000	Dinas Kesehatan
				84.	Rasio RS Pers Satuan Penduduk	Dinas Kesehatan
				85.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Dinas Kesehatan
				86.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk x 1000	Dinas Kesehatan
				87.	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Dinas Kesehatan
				88.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
				89.	Cakupan Puskesmas	Dinas Kesehatan
				90.	Cakupan Pembantu Puskesmas	Dinas Kesehatan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
18.	Meningkatkan dan Mendorong Ekonomi Kerakyatan Dengan Berbasis Pemanfaatan Potensi Lokal Serta Penguatan Modal Usaha UMKM Melalui Jasa Perbankan	24.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	91.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BAPPEDA
				92.	Laju Inflasi	BAPPEDA
				93.	PDRB Per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	BAPPEDA
				94.	Tingkat Kemiskinan	BAPPEDA
				95.	Pertumbuhan Ekonomi	BAPPEDA
				96.	IPM	BAPPEDA
				97.	TPAK	BAPPEDA
				98.	TPT	BAPPEDA
				99.	Presentase Koperasi Aktif	BAPPEDA
				100.	Usaha Mikro dan Kecil	BAPPEDA
				101.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	BAPPEDA
				102.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	BAPPEDA
				103.	Terbentuknya Kelompok Usaha Baru	BAPPEDA
				104.	Pengenalan berbagai tenun ikat khas Maluku Barat Daya	BAPPEDA

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				106.	Ketersediaan Bangunan bengkel Kerja	BAPPEDA
				107.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	BAPPEDA
				108.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	BAPPEDA
				109.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyard Rupiah)	BAPPEDA
19.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Dan Komunikasi Yang Mendukung Mobilisasi Pemasaran Hasil Produksi Masyarakat	25.	Tersedianya Sarana Prasarana Komunikasi Sebagai Pendukung Mobilisasi Pemasaran Hasil Produksi Masyarakat	110.	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara /Terminal Bis (Buah)	Dinas Perhubungan
				111.	Pelabuhan Udara	Dinas Perhubungan
				112.	Tambatan Perahu	Dinas Perhubungan
				113.	Terminal Mobil/Bus	Dinas Perhubungan
				114.	Jumlah angkutan darat(%)	Dinas Perhubungan
				115.	Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas , APIL dan Marka Jalan	Dinas Perhubungan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				116.	Rehabilitasi Saran Prasarana Pelabuhan Penyebrangan	Dinas Perhubungan
				117.	Panjang Pagar Pengaman Jalan	Dinas Perhubungan
				118.	Dokumen Perencanaan	Dinas Perhubungan
				119.	Panjang Jalan Desa Sirtu (Km)	Dinas Perhubungan
				120.	Jumlah Uji KIR Kendaraan (Unit)	Dinas Perhubungan
20.	Memperluas Akses Pemanfaatan Listrik Bagi Kepentingan Masyarakat, Investasi dan Pelayanan Pemerintahan	26.	Tersedianya Daya Listrik Yang Memadai Yang Dapat Digunakan Dalam Mendukung Kegiatan Masyarakat, Pelayanan Pemerintahan Maupun Dunia Investasi	121.	Rasio Elektrifikasi	Bagian Perekonomian dan SDA
				122.	Pengembangan Energi Terbarukan	Bagian Perekonomian dan SDA
21	Meningkatkan Sarana & Prasarana Infrastruktur Publik Dasar	27.	Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi, Komunikasi dan Informasi Di 17 Kecamatan	123.	Jumlah Jaringan Komunikasi seluler	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				124.	Rasio Jaringan Komunikasi (tower)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				125.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				126.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (siaran)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				100.	Jumlah Website di Lingkup Pemda Maluku Barat Daya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				101.	Pameran / Expo	Dinas Komunikasi dan Informatika
				102.	Media Penunjang Rakyat (media Center)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				103.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Dinas Komunikasi dan Informatika
				104.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				105.	Tersedianya Lalu Lintas Jalan Dan Konstruksi Jembatan Yang Memadai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				106.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah seluruh Rumah Tangga x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				107.	Presentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22.	Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsinya Untuk	28.	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsinya	108.	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				109.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dan 10% RTH privat dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				110.	Persentase peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				111.	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh dikawasan perkotaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				112.	Persentase Berkurangnya Perubahan Fungsi Kawasan Menjadi Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
23.	Meningkatkan Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Komoditas Unggulan, Berbasis Karakter Sumber Daya Alam Lokal	29.	Meningkatnya Pengembangan Komoditas Unggulan, Berbasis Karakter Sumber Daya Alam Lokal	113.	Jeruk Kisar (gerakan penembangan jeruk kisar/gerakan jekis)	Dinas Pertanian
				114.	Bawang Merah Lakor	Dinas Pertanian
				115.	Kerbau Moa	Dinas Pertanian
				116.	Kambing Lakor	Dinas Pertanian
				117.	Domba Kisar	Dinas Pertanian
				118.	Jagung	Dinas Pertanian
		30.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	119.	Terlaksananya Paket Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian
				120.	Tersedianya Tenaga Penyuluh	Dinas Pertanian
				121.	Tersedianya Sarana Prasarana dan Metode Penyuluh	Dinas Pertanian
				122.	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani	Dinas Pertanian
				123.	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gerbang Arta Kemo (GERBANG ARTA KEMO)	Dinas Pertanian
		31.	Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mengembangkan Budidaya Pertanian dan Perikanan	124.	Jumlah Kelembagaan Nelayan Dan Pembudidayaan Yang Dibina	Dinas Perikanan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				125.	Jumlah Kelembagaan Usaha Perikanan Yang Di Tingkatkan Akses Kemitraan	Dinas Perikanan
				126.	Jumlah Sosialisasi Dan Peserta Sosialisasi Sertifikasi Tanah Nelayan	Dinas Perikanan
				127.	Jumlah Nelayan Yang Mendapat Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Dinas Perikanan
				128.	Jumlah Nelayan Yang Memiliki Kartu Nelayan	Dinas Perikanan
				129.	Jumlah Nelayan Yang Profesional Dalam Mengoprasikanberbagai Alat Tangkap	Dinas Perikanan
				130.	Jumlah Pembudidaya Yang Memahami Pentingnya Cara Berbudidaya Yang Baik Dan Penanganan Hama Dan Penyakit Ikan	Dinas Perikanan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				131.	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mengikuti Magang	Dinas Perikanan
				132.	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Provisional Mengolah Produk Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
				133.	Jumlah Kelembagaan Nelayan Dan Pembudidaya Yang Dibina	Dinas Perikanan
		32.	Meningkatkan Hubungan Kerjasama Bidang Perdagangan Lintas Lokal, Nasional, Internasional	127.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Dalam dan Luar Negeri)	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				128.	Ketersediaan Pasar	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				129.	Ketersediaan Gudang (Buffer Stock)/Kecamatan	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				130.	Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Metreologi Legal	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				131.	Monitoring Terhadap Harga Bahan Pokok Penting Dan Stock	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				132.	Pendataan Alat-alat UTTP Tera-Tera Ulang	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				133.	Ketersediaan Bangunan Lab.Kemetrologian	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				134.	Terciptanya Pasar Tertib Ukur	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				135.	Ketersediaan Pasar Ikan	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				136.	Revitalisasi pasar ikan	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				137.	Penataan Halaman Pasar	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				138.	Jumlah Aparatur Disektor Perdagangan	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				139.	Ketersediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan (Paket)	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				140.	Jumlah Pedagang Pasar Yang Menerima Penyuluhan	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				141.	Jumlah Pedagang Pasar Yang Mengikuti Diklat Pengetahuan Pengelolaan Pasar	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
24.	Menanamkan Nilai – Nilai Luhur Kalwedo, Honoly, Sioli Lieta Ama Siali Pada Generasi Muda MBD	33.	Meningkatkan Etika Generasi Muda Maluku Barat Daya Yang Berbudaya Kalwedo, Honoly, Sioli Lieta Ama Siali	142.	Ketersediaan Lampu Penerangan Areal Pasar	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				143.	Jumlah Pedagang Pasar Yang Mengikuti Diklat Pengetahuan Pengelolaan Pasar	Dinas PERINDAGKOP dan UMKM
				144.	Kajian /NA Kurikulum Muatan Lokal Tentang Falsafah Dan Nilai-Nilai Luhur Kalwedo Dan Aneka Kearifan Lokal Yang Dimiliki	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				145.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Tentang Falsafah Fan Nilai-Nilai Luhur Kalwedo Dan Kearifan Lokal Yang Dimiliki	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				146.	Pembudayaan falsafah dan nilai-nilai luhur kalwedo dilingkungan pelajar, Mahasiswa, masyarakat MBD dan Maluku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
25.	Meningkatkan Pemahaman dan Penghargaan Terhadap Khasana Budaya MBD	34.	Terpeliharanya Khasana Budaya Maluku Barat Daya	147.	Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang penggunaan bahasa lokal, Pakaian Adat, dan aksesoris budaya lokal dilingkungan sekolah, instansi Pemerintah dan Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				148.	Sosialisasi bahasa lokal, Pakaian adat, dan aksesoris budaya lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26.	Melestarikan Jati Diri Budaya Keterkaitan Jaringan Sosio Kultur, Ekonomi Serta Lingkungan Alam	35.	Terpeliharanya Budaya Serta Lingkungan Alam	149.	Kajian / NA Budaya Sasi Dan Nilai-Nilai Persaudaraan Di Kabupaten MBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27.	Meningkatnya Pengembangan Potensi – Potensi Wisata Di Kabupaten MBD	38.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Wisata Unggulan	150.	Penyelenggraan festifal Seni dan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				151.	Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
				152.	Jumlah Sanggar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				153.	Jumlah Bahasa Daerah yang masih dikuasai dengan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				154.	Kunjungan wisata Manca Negara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				155.	Kunjungan Domestik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				156.	Kunjungan Wisata Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				157.	Jumlah pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SUMBER DATA
		39.	Lambang Daerah Yang Menggambarkan Ciri Khas Wilayah Yang Berbasis Kepulauan	158.	Sayembara Perubahan Lambang Daerah Sesuai Budaya Kalwedo	Bagian Adminstrasi Pemerintahan
				159.	Perubahan Lambang Daerah	Bagian Adminstrasi Pemerintahan
				160.	Sosialisasi Lambang Daerah Baru	Bagian Adminstrasi Pemerintahan

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal, 16 Februari 2019

(BUPATI MALUKU BARAT DAYA

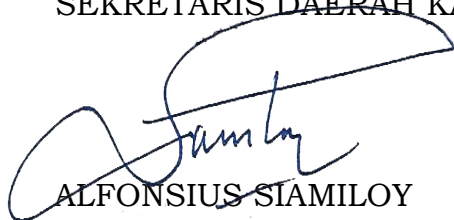


BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal, 16 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,


ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 4